



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SEKRETARIAT TRANSPARANSI PENERIMAAN INDUSTRI EKSTRAKTIF

Gedung Kementerian Negara BUMN, Lantai 8, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13
Jakarta 10110 - Indonesia
Telepon. 34832642; Fax. 34832645

18 Desember 2012

Nomor : S-20 /D.III.M.EKON.EITI/12/2012
Lamp : lembar
Perihal : Risalah Rapat Tim Pelaksana 30 November 2012

Kepada Yth:
(Mohon lihat daftar lampiran)

Di
Tempat

Sehubungan dengan Rapat Tim Pelaksana Peraturan Presiden No.26 Tahun 2010 pada hari Jumat, 30 November 2012 yang lalu, bersama ini kami sampaikan risalah Rapat Tim Pelaksana dan lampiran-lampiran terkait sesuai dengan hasil keputusan rapat.

Demikian disampaikan. Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**Asisten Deputi Urusan Ketenagalistrikan selaku
Sekretaris Transparansi Penerimaan Industri Ekstraktif**



Emy Perdanahari, Ph.D

Lampiran
Nomor : S- /D.III.M.EKON.EITI/12/2012
Tanggal : Desember 2012

DAFTAR NAMA

1. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
4. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
5. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
7. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan
8. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
11. Deputi Akuntan Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
12. Direktur Utama PT. Pertamina (Persero)
13. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Riau
14. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur
15. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
16. Supriatna Suhala, Asosiasi Pertambangan Batubara
17. Ir. Winardi, MM, Asosiasi Pertambangan Indonesia
18. Dipnala Tamzil, Asosiasi Perminyakan Indonesia
19. Faisal Basri
20. Maryati Abdullah, PATTIRO
21. Wasingatu Zakiyah, IDEA



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SEKRETARIAT TRANSPARANSI PENERIMAAN INDUSTRI EKSTRAKTIF

Gedung Kementerian Negara BUMN, Lantai 8, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13
Jakarta 10110 - Indonesia
Telepon. 34832642; Fax. 34832645

**RISALAH RAPAT TIM PELAKSANA
TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF INDONESIA**

- Hari / Tanggal** : Jumat / 30 November 2012
- Waktu** : 09:30 – 11.30
- Tempat** : Ruang Serayu – Gedung A.A. Maramis II Lantai 3
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Agenda** : 1. Status terkini pengisian formulir pelaporan EITI
2. Persiapan Rekonsiliasi
3. Penetapan Tim Teknis
4. Ruang lingkup laporan EITI tahun 2010

Pemimpin rapat :

Dr. Emy Perdanahari, selaku Sekretaris Transparansi Penerimaan Industri Ekstraktif mewakili Dr. Wimpy S. Tjejep, Deputi ESDM dan Kehutanan, Kemenko Bidang Perekonomian.

Peserta Rapat:

Instansi Pemerintah

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Delpina Siahaan
2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Yanti Sukmayanti
3. Kementerian Dalam Negeri, Dyah Kartika
4. Kementerian Dalam Negeri, Gatot Setyo
5. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Erry Kundari
6. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Istayu Indri. H.
7. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Juniarti Chandra
8. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, M. Iqbal M.P.
9. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Yosua Martin

10. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Yulianto
11. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Ristriardani
12. Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, Agung Wijanarko
13. Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, Arif Mahmudin Zuhri
14. Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, M. Reza Fahmi
15. Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, Ronny Purwanto
16. Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, M. Irfan S.
17. Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Taukhid
18. Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, M. Hijrah
19. Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Sandy Firdaus
20. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Alexius W. Bayu S.
21. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Bobby Hamzar Rafinus
22. PT. Pertamina, Budhi Dermawan
23. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Jawa Timur, Yoyok Suroyo
24. Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Kalimantan Timur, Edward Noviansyah
25. Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Timur, Bantolo
26. Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Riau, Januaris
27. Sekretariat Daerah Propinsi Riau, Emrizal Pakis

Industri

1. *Indonesian Coal Mining Association*, Supriatna Suhala
2. *Indonesian Mining Association*, Hendra Sinadia

NGO

1. IDEA, Wasingatu Zakiyah
2. PWYP, Maryati Abdullah
3. ICEL, Dyah Paramita

Sekretariat EITI Indonesia

1. Plh Wakil Sekretaris Tim Transparansi, Ambarsari Dwi Cahyani
2. Regulatory Specialist, Ronald Tambunan
3. IT Specialist, Nugraha Adi Prasetya
4. Finance Specialist, Agus Prasetyono
5. Communication Specialist, Inggita Notosusanto
6. Stakeholder Specialist, Dyah Hestu Lestari
7. Administrative Specialist, Anita Pascalia

Bank Dunia

1. Advisor on the EITI, David W. Brown

Sekretariat Internasional EITI

1. Technical Advisor, Sam Bartlett
2. Asia Coordinator, Wouter Biesterbos

Risalah Rapat

Emy Perdanahari:

Atas nama Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Asisten Deputi Urusan Ketenagalistrikan membuka rapat dengan memaparkan empat agenda:

1. Kemajuan pengumpulan formulir pelaporan
2. Hasil pengadaan Rekonsiliator Independen untuk menyusun laporan EITI Indonesia tahap pertama
3. Rencana kerja tahun 2013
4. Kegiatan validasi (evaluasi) kegiatan EITI Indonesia

Keempat agenda tersebut sebagai akan dipaparkan sekaligus terlebih dahulu, kemudian rapat akan membahasnya satu per satu. Paparannya sebagai berikut:

I. Kemajuan Pengumpulan Formulir Pelaporan

1. Pengumpulan formulir dari perusahaan industri ekstraktif
 - Dari unit produksi minyak dan gas telah diterima total 57 laporan operator Kontrak Kerja Sama (KKS) Migas (100%);
 - Dari mitra migas telah diterima 73 dari total 100 mitra pemilik saham dalam Kontrak Kerja Sama (KKS) Migas (73%);
 - Dari unit produksi mineral dan batubara, telah diterima 68 dari total 71 perusahaan mineral dan batubara (96%). Dua (2) perusahaan timah sudah tutup dan 1 IUP batubara (PT. Transisi Energi Satunama, Samarinda) tidak menyampaikan laporan hingga kini.
2. Laporan dari Instansi Pemerintah
 - BPMigas (d.h.), Ditjen Migas, Ditjen Minerba, Ditjen Anggaran dan Ditjen Perimbangan Keuangan sudah menyampaikan laporan.
 - Ditjen Pajak sedang menyusun laporannya setelah menerima berkas otorisasi pembukaan data.
 - 7 perusahaan tambang (dari total 68 yang telah mengirimkan laporannya) belum memberi lembar otorisasi untuk membuka data dan informasi pajak. Sehingga data pajak dari 7 perusahaan tambang ini tidak akan dapat direkonsiliasi.

II. Hasil pengadaan Rekonsiliator Independen untuk menyusun Laporan tahap pertama

- Panitia Lelang telah memutuskan daftar 4 perusahaan peringkat tertinggi berdasarkan penilaian atas *Expression of Interest*, yang dapat melanjutkan pengajuan untuk menjadi Rekonsiliator;
- Perusahaan yang berada di peringkat pertama, Delloite Indonesia telah mengikuti proses pengajuan proposal, tetapi proposal terlambat diterima oleh Panitia Lelang dari jadwal yang telah ditetapkan (September);
- Kemudian, perusahaan yang berada di peringkat kedua, yaitu KAP Ikhwan Gideon Sofwan telah diproses untuk diajukan sebagai rekonsiliator (Oktober);
- Proposal dari KAP Ikhwan & Gideon telah diterima pada November minggu pertama;

- Pada November minggu ke-2 dan ke-3, Panitia Lelang telah melakukan evaluasi proposal dan negosiasi kontrak, dan akan dilanjutkan dengan permintaan *No Objection Letter* (NOL) kepada Bank Dunia secepatnya (catatan: permintaan tersebut disampaikan kepada Bank Dunia jam 16:25 hari itu);
- Rapat Tim Pelaksana ini bertujuan untuk membahas dan menyetujui Rekonsiliator Independen yang telah diseleksi oleh Panitia Lelang tersebut.
- Rekonsiliato diharapkan akan bekerja selama 3 bulan, yaitu Desember 2012 hingga Februari 2013. Laporan hasil rekonsiliasi diperkirakan terbit pada akhir Februari atau awal Maret 2013.

Deskripsi Rencana Kerja Pelaporan dan Rekonsiliasi

I. Laporan EITI Pertama (2009)					
No	Jenis Pekerjaan	Pihak yang bertanggungjawab	Bentuk kegiatan	Perkiraan jadwal	Kemajuan yang sudah ada
1	Proses Rekonsiliasi	Rekonsiliator independen	- Sekretariat mendukung data dan informasi yang diperlukan	Desember 2012- Februari 2013	Formulir pelaporan sudah terkumpul. Masih sisa 3 minerba, 27 partner migas, dan 7 lembar otorisasi pajak
2	Penulisan laporan hasil rekonsiliasi	Rekonsiliator independen	- Sekretariat mendukung data dan informasi yang diperlukan	Januari-Februari 2013	
3	Review dan persetujuan atas laporan	Sekretariat	- Sekretariat mempersiapkan bahan yang akan direview		
		Tim Pelaksana	- Rapat Tim Pelaksana	Februari 2013	
4	Publikasi laporan	Sekretariat dan Tim Pelaksana	- Upload laporan di website EITI Indonesia, sosialisasi di Jakarta dan daerah produsen	Maret-June 2013	
5	Refleksi pembelajaran dari proses EITI	Sekretariat	- Sekretariat membuat analisa proses selama pelaksanaan.	Maret 2013	
		Tim Pelaksana	- Tim Pelaksana memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan	April 2013	

II. Laporan EITI Kedua (2010/2011)					
No	Jenis Pekerjaan	Pihak yang bertanggungjawab	Bentuk kegiatan	Perkiraan jadwal	Kemajuan yang sudah ada
1	Penyusunan catatan ruang lingkup pelaporan tahap kedua	Sekretariat	- Sekretariat menyusun lingkup pelaporan	Januari-Maret 2013	Draft ruang lingkup tahun 2010 sudah dimulai. Sebagian data dasar sudah dikumpulkan.
		Tim Pelaksana	- Instansi Pemerintah yang mengisi mendukung data dasar yang diperlukan.		
2	Penyusunan kerangka acuan kerja dan metode pemilihan Rekonsiliator Independen	Sekretariat	- Sekretariat menyusun kerangka acuan Rekonsiliator Independen	Februari-Maret 2013	
3	Persetujuan catatan ruang lingkup pelaporan tahap kedua; dan kerangka acuan kerja dan metode pemilihan Rekonsiliator Independen	Tim Pelaksana	- Rapat Tim Pelaksana	April 2013	
4	Distribusi formulir pelaporan kepada perusahaan dan instansi pemerintah.	Sekretariat	- Sekretariat mengirimkan formulir pelaporan dan sosialisasi pengisian formulir	Mei-Juli 2013	
5	Pengumpulan formulir pelaporan kepada Sekretariat	Sekretariat dan Tim Pelaksana	- Sekretariat mengumpulkan formulir pelaporan dari entitas pelapor	Juni-Agustus 2013	
6	Pengadaan dan penunjukan Rekonsiliator Independen	Panitia Lelang dan Sekretariat	- Panitia lelang melakukan Pengadaan Rekonsiliator didukung oleh Sekretariat	Juni-Agustus 2013	
		Tim Pelaksana	- Rapat Tim Pelaksana menyetujui rekonsiliator yang ditunjuk		
7	Proses Rekonsiliasi	Rekonsiliator independen	- Sekretariat mendukung data dan informasi yang diperlukan	Agustus-Oktober 2013	
8	Penulisan laporan hasil rekonsiliasi	Rekonsiliator independen	- Sekretariat mendukung data dan informasi yang diperlukan	September-Oktober 2013	
9	Review dan persetujuan atas laporan	Sekretariat	- Sekretariat mempersiapkan bahan yang akan direview	November 2013	
		Tim Pelaksana	- Rapat Tim Pelaksana	Desember 2013	
10	Publikasi laporan	Sekretariat dan Tim Pelaksana	- Upload laporan di website EITI Indonesia, sosialisasi di Jakarta dan daerah produsen	Desember 2013 - Februari 2014	
11	Refleksi pembelajaran dari proses pelaporan EITI tahap kedua	Sekretariat	- Sekretariat membuat analisa proses selama pelaksanaan.	Desember 2013	
		Tim Pelaksana	- Tim Pelaksana memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan	Januari 2014	

IV. Kegiatan validasi (evaluasi) kegiatan EITI Indonesia

Validasi adalah penilaian independen atas pelaksanaan transparansi pendapatan negara di negara kandidat EITI. Hasil validasi dapat menentukan status Indonesia dari negara kandidat menjadi negara patuh (*compliant*). Sejak ditetapkan menjadi Negara kandidat (18 Oktober 2010), Indonesia memiliki masa waktu 2,5 tahun untuk divalidasi, yaitu hingga 18 April 2013. Sekretariat Tim Transparansi Indonesia menjadwalkan kegiatan validasi pada Februari 2013 – April 2013, namun mengalami beberapa kendala.

Validasi tidak tercantum secara eksplisit dalam Perpres 26/2010. Yang tercantum secara eksplisit adalah bahwa evaluasi dilakukan oleh Tim Pengarah (pasal 5c). Dengan asumsi bahwa validasi dapat diinterpretasikan sebagai evaluasi, maka untuk melakukan validasi (evaluasi) memerlukan arahan Tim Pengarah.

Berdasarkan kedua alinea di atas, di mana batas waktu laporan validasi kepada Dewan EITI Internasional adalah 18 April 2013, maka Indonesia harus segera melakukan pengadaan validator. Namun demikian ini memerlukan arahan dari Tim Pengarah. (Rapat Tim Pengarah diagendakan awal Desember)

Bila kegiatan validasi tidak dapat dilaksanakan pada bulan April 2013, Indonesia harus mengajukan permohonan untuk perpanjangan masa validasi kepada Dewan EITI Internasional dengan alasan '*exceptional circumstances*' beserta penjelasannya.

Pembahasan dan keputusan mengenai paparan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

I. Kemajuan Pengumpulan Formulir Pelaporan

Nama-nama perusahaan mitra migas akan disampaikan kepada peserta rapat, terutama perwakilan dari pemerintah daerah terkait untuk dapat membantu pengumpulan laporan dimaksud.

II. Hasil pengadaan Rekonsiliator Independen untuk menyusun Laporan tahap pertama

Karena belum adanya NOL dari Bank Dunia mengenai penunjukan Rekonsiliator, maka sesuai usulan dari Bapak Yulianto (Kementerian ESDM) akan disampaikan surat pemberitahuan dari Ketua Tim Pelaksana kepada anggota Tim Pelaksana setelah diperoleh NOL. Namun secara paralel, rapat ini juga sudah memberikan persetujuan terhadap penunjukan tersebut.

Kerangka acuan dan kronologis pengadaan rekonsiliator juga akan disampaikan kepada anggota Tim Pelaksana.

III. Rencana Kerja Tahun 2013

Ruang lingkup pelaporan berikutnya akan memasukkan 2 daerah sebagai pilot yang akan direkonsiliasi apa saja yang dibayarkan oleh perusahaan batubara kepada pemerintah daerah dan apa yang diterima oleh pemerintah daerah secara langsung.

Penulisan ruang lingkup pelaporan berikutnya bisa dimulai Januari-Maret 2013 yang akan datang dengan memasukkan juga Ditjen Perbendaharaan sebagai pemegang data mengenai penerimaan yang masuk ke kas negara. Namun mungkin harus memperhatikan perubahan EITI Rules yang akan terjadi sekitar bulan Mei 2013 yang dapat diadopsi ke template pelaporan berikutnya.

SK Tim Teknis akan diterbitkan Januari 2013. Beberapa perubahan nama anggota Tim Teknis yang sudah diajukan oleh masing-masing instansi adalah sebagai berikut:

- BPKP: Bonny Anang Dwijanto diganti oleh Arman S. Harahap, dan Saria Hutapea diganti oleh Yanti Sukmayanti.
- BP Migas: berganti nama menjadi SKSP Migas, dengan nama anggota dalam Tim Teknis tetap.
- Dirjen Pajak: Amri Zaman pensiun, dan nama penggantinya akan disampaikan kemudian oleh Dirjen Pajak.
- Dalam Negeri: A. Fatoni diganti oleh Dyah Kartika.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan: Tri Buwono diganti oleh Rudi Widodo (Direktorat Pengelolaan Kas Negara), Sudarmanto diganti oleh Tauhid (Kasubdit Penerimaan Negara)

Jika ada perubahan lagi selain perubahan diatas, harap disampaikan melalui surat resmi dari instansi masing-masing.

Risalah rapat sebagai informasi publik akan dimasukkan ke dalam website EITI Indonesia.

Rapat berikutnya akan membahas mengenai penyerapan anggaran 2010-2012 sehingga bisa dievaluasi dan dilakukan perbaikan. Namun dari pemaparan yang ada, peserta rapat tidak memberikan komentar sehingga dianggap sudah menyetujui workplan tersebut, walaupun workplan ini masih dapat berubah-ubah lagi.

IV. Kegiatan validasi (evaluasi) kegiatan EITI Indonesia

Validasi adalah bagian dari komitmen keikutsertaan Indonesia dalam EITI.

Rapat Tim Pelaksana berikutnya diharapkan bisa diadakan di bulan Januari 2013 untuk persiapan pengadaan validator sehingga jika bulan Februari-Maret 2013 terjadi masalah dalam pengadaannya, maka bisa ditulis surat permintaan perpanjangan ke Sekretariat EITI Internasional.

Rapat selesai.

Catatan:

Risalah rapat ini dilengkapi dengan beberapa lampiran, sesuai keputusan rapat, sebagai berikut:

1. Daftar mitra operator migas yang belum mengembalikan formulir EITI 2009;
2. Kerangka Acuan Rekonsiliator EITI Indonesia untuk laporan tahap pertama;
3. Surat Pemberitahuan *No Objection Letter* (NOL) untuk Rekonsiliator yang terpilih;
4. Daftar nama anggota Tim Teknis sesuai perubahan dari rapat ini.